

## Dua Agenda Penting NU



SAID BUDAIRY

Pengurus DPP.  
Partai Kebangkitan Ummat

**B**agi NU ada dua masalah yang besar dan mendasar, yaitu pengembangan pemikiran keagamaan di kalangan kader-kadernya. Sedangkan masalah yang kedua, seperti diakui sendiri oleh Gus Dur waktu acara seminar di Purwokerto, adalah penanganan organisasi yang amburadul. Dua hal ini sebenarnya yang harus diperhatikan dan memperoleh prioritas utama. Kalau masalah PKB ataupun partai-partai lainnya yang ada kaitannya dengan NU, itu terserah saja.

Dalam hal pengembangan pemikiran keagamaan selama ini NU dibangun berdasarkan pandangan-pandangan keagamaan tradisional. Bermadzhabpun, ya pada dasarnya cuma *qauli*. Karena warga NU memang umumnya berasal dari pesantren, atau berasal lingkungan kiai-kiai yang dulu belajarnya di Mekah yang kemudian terus menyebar ke pelbagai tempat di Indonesia. Jadi pandangan keagamaan mereka cenderung bercorak seperti yang saya bilang tadi. Tapi setelah itu, dalam beberapa waktu kemudian, dari santri-santri penerusnya ternyata cukup banyak yang meneruskan belajar di perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, seperti Baghdad, Mesir, sampai

yang menempuh studi di negara Barat. Sebagian dari mereka ini kemudian mengembangkan diri dan bergabung dengan komunitas di luar NU. Orang-orang seperti ini lantas menerima pemikiran keagamaan yang tentu saja tidak seperti kiai-kiai dahulu yang hanya belajar di pesantren.

Kita dulu pernah pada tahun 80-an awal berusaha mengkaji ulang kitab-kitab kuning atau buku-buku yang banyak dirujuk di kalangan pesantren, termasuk di antaranya yaitu kitab Ta'lim al-Muta'allim. Waktu itu kita juga mengundang orang lain seperti Utomo Dananjaya. Dalam kajian tersebut ada pengantar dan gambaran umum tentang pokok permasalahan yang hendak dikaji. Saat itu ternyata sudah terjadi benturan pemikiran. Saya ingat betul sewaktu Dananjaya mengatakan bahwa sudah saatnya kitab Ta'lim itu dibakar saja. Padahal di situ juga hadir beberapa kiai, salah satunya wakil rais Syuriah. Saya lupa namanya. Pokoknya termasuk orang yang penilaiannya terhadap kitab kuning masih sangat mutlak dan enggan untuk mengkritisi. Kitab Ta'lim kan memberi penjelasan tentang metode belajar-mengajar serta hubungan antara murid dengan gurunya atau santri dengan kiaiinya. Contohnya, murid tidak perlu tanya macam-macam. Terima saja pelajaran yang disampaikan oleh sang guru atau kiai. Ini yang kemudian disikapi secara kritis dan telanjang oleh Dananjaya sehingga dia sampai menganjurkan seperti itu. Bayangkan saja, orang yang menganggap kitab tersebut bernilai setengah al-Qur'an dengan orang yang mengkritisinya semacam tadi. Maka forum diskusi itupun

bubar. Diskusi yang sudah kita rancang dengan bagus itu akhirnya harus bubar karena pihak Syuriah NU bersikap keras sekali, sementara kita belum siap juga, bagaimana cara mengatasi keadaan begitu.

Namun pengembangan pemikiran semacam tadi saya kira mulai berkembang lagi belakangan ini, atau mungkin malah sudah cukup lama. Bahkan nomor terakhir jurnal *Tashwirul Afkar* kemarin itu kan ikut mengkaji masalah-masalah serupa sebagaimana yang saya utarakan tadi, yaitu menyoroti kitab 'Uqud al-Lujain yang dianalisa sedemikian rupa sehingga salah satu kesimpulannya, ya harus dirombak pemahaman terhadap isi kitab tersebut, atau paling tidak ya direvisi.

Masdar waktu dulu juga senang sekali mengutarakan pemikiran pembaharuannya. Cak Nur juga sedang getol-getolnya menggelindingkan ide-ide pembaharuannya. Itu sekitar tahun 80-an. Lalu saya bilang pada Masdar, "Dar, kalau ente yang membawa pemikiran-pemikiran pembaharuan itu ke dalam NU, jauh lebih mudah diterima. Tapi kalau Cak Nur yang melakukan, ya pasti langsung ditolak". Penolakannya itu pertama-tama bukan karena masalah substansi, tapi karena Cak Nur itu bukan orang NU. Sekarang masalah-masalah begini sepertinya terus berkembang, sementara kita belum tahu bagaimana caranya supaya kiai-kiai sepuh NU bisa mengadopsinya. Padahal beliau-beliau itulah yang akan mengajarkan kepada sekian ribu santrinya yang nantinya juga akan berkembang, sehingga kita bisa membayangkan pada suatu saat akan terdapat sebuah kelompok besar salaf di satu pihak dengan kelompok besar peng-

kritiknya atau para pembaharu pemikiran keagamaan di pihak lain. Masalahnya, bagaimana agar tidak sampai terjadi benturan sehingga NU tidak sampai pecah. Ini yang penting dan perlu dipikirkan.

Untuk mengatasi masalah itu semua saya kira diperlukan kerja simultan. Pertama menyangkut pengembangan pemikiran seperti yang telah saya kemukakan, yaitu bagaimana supaya tidak sampai terjadi benturan yang fatal antara penganut pemikiran lama dengan penganut pemikiran baru. Harus dipikirkan supaya pembaharuan dapat masuk ke dalam NU tanpa gejolak besar. Mungkin seperti yang dikembangkan Masdar dengan P3M-nya. Juga Lakpesdam yang mengupayakan sosialisasi pengembangan pemikiran keagamaan, sehingga pada akhirnya mampu menghasilkan banyak kiai muda yang pemikirannya lebih terbuka terhadap interpretasi-interpretasi baru, serta bermadzhabnya tidak lagi *qouli* tetapi *manhaji*.

Sekarang ini sudah lumayan perkembangannya. Tapi kiai-kiai sepuh kan sebenarnya masih tetap aktif mengajar di pesantren dengan pola-pola lama. Jadi usaha itu belum cukup. Sebab bagaimanapun, jika dilakukan secara *gradakan* kayak yang dikemukakan Agil Siraj kemarin, salah satunya dalam forum PMII, yang menyangkut masalah *qonun asasi*, yaitu berupa kritik dia terhadap *qonun asasi*, hal itu bisa kontra produktif. Ya semua ngamuk. Bagaimana tidak, bukankah *qonun asasi* sudah dipandang demikian sakral. Padahal kalau kita pikir, mana ada sih yang tidak mengalami perubahan dan perkembangan. Hanya saja kalau caranya seperti

## GALERI

itu, ya tabrakan. Bahkan juga mengenai penafsiran Syi'ah dan Aswaja. Gus Dur bilang NU itu Syi'ah kultural. Ini semua sebetulnya bisa diterima jika cara masuknya tidak keliru. Nah, seandainya Syuriah NU-nya yang berwibawa itu turut menggerakkan pembaharuan, saya kira hasilnya pasti luar biasa. Inilah yang mungkin perlu dipikirkan di masa mendatang, meskipun sekali lagi ingin saya katakan bahwa masalah penanganan organisasi juga tetap merupakan masalah yang perlu segera ditangani serius.

Adapun yang kedua yaitu masalah organisasi yang amburadul. Penyebabnya di sini bisa macam-macam. Misalnya karena tidak disiplin menjalankan konstitusinya sendiri. Kita bisa lihat orang-orang banyak yang tidak hirau dengan aturan main organisasi.

Sebetulnya pada zaman saya sudah dirintis melalui LAKPESDAM. Kita bisa buka kembali file-filenya. Ada program pelatihan kepemimpinan organisasi yang dilaksanakan berulang kali di beberapa tempat. Pesertanya dari wilayah-wilayah NU yang kemudian mengutus orang-orang NU cabang. Di situ mereka kita ajak melihat organisasi secara benar serta mempelajari bagaimana cara berorganisasi yang baik. Cuma saya tidak tahu, program tersebut sekarang masih berjalan atau tidak. Ini kan salah satu cara. Lembaga-lembaga otonom NU lainnya pun semestinya juga melakukan hal yang sama bagi kader-kadernya. Misalnya Ansor, IPNU, PMII, mestinya juga memperhatikan kepentingan perlunya orang-orang yang tahu banyak dan mampu mematuhi aturan berorganisasi serta menguasai manajemen organisasi. Ini

menurut saya, dua aspek yang perlu diperhatikan, dan kalau perlu, segera diantisipasi melalui keputusan-keputusan Mukhtamar nanti.

### Perlu Bagi Tugas

Godaan politik sedikit banyak pasti berpengaruh. Tapi kalau mau disiplin, yang mau mengembangkan diri di PKB, ya sudah, tidak apa-apa. Cuma jangan mencampuri lagi organisasi NU. Begitu juga yang di NU. Mereka harus berusaha disiplin untuk memikirkan pengembangan organisasi NU-nya. Jangan seperti kemarin. Gus Dur sebagai Ketua Umum menyatakan cuti untuk ikut kampanye. Tetapi jauh sebelum kampanye sudah ngomong terus tentang PKB, tidak pernah ngomong tentang NU. Said Agil, katib Syuriah, juga begitu. Dia tidak ada hubungannya dengan PKB tetapi lebih banyak bicara mengenai PKB daripada NU. Nah, yang seperti ini nantinya bisa merusak, dan memang rancu. Kan jika mereka mau mendisiplinkan diri, misalnya ngomong; "saya ingin jadi politisi di PKB". Ya sudah, tidak apa-apa. Jalan saja. NU-nyapun juga begitu.

Adapun faktor ekonomi, saya kira kalau niatnya masuk partai karena ingin menjadi anggota DPR, kemudian bisa meningkatkan kehidupan ekonominya, ya susah. Jadi susah diatur kalau berpolitik supaya bisa hidup secara ekonomi. Ya niatnya harus ditata. Dulupun juga begitu. Tapi justru dari pengalaman masa lalu itulah kita harus belajar buat saat ini. Anggota DPR-nya PKI dulu melarat-melarat. Cuma karena mungkin niatnya membela rakyat, dan mempunyai disiplin organisasi, gaji mereka bukan diterima dari DPR-nya, melainkan

## GALERI

dari CC (*central committee*) partai. Jadi semua gaji diambil oleh CC partainya, kemudian mereka digaji oleh CC. Aman kalau begitu, tidak ada masalah. Hanya saja ini tidak mungkin dipraktekkan sekarang.

Saya lebih suka bicara realistik saja. Kenyataannya sekarang ada NU, ada PKB. Taruhlah PKU tidak dihitung. Kemudian ini sudah kita jadikan model untuk perjalanan NU ke depan. Maka yang di PKB ya tetap saja di situ. Kalau mau, sebetulnya mereka bisa juga menjadi bagian sumber daya pengembangan NU sebagai jama'ah. Saya pernah jadi bendahara PBNU. Waktu itu sudah ada khitah. Artinya tidak ada lagi hubungan secara organisasi antara orang-orang NU yang di DPR dengan kita yang di PBNU. Tetapi mereka tetap kita hubungi supaya orang-orang itu memberikan sumbangsuhnya kepada PBNU. Ini merupakan sumber kekuatan yang cukup besar untuk menghidupi rutinitas organisasi, seperti bayar telepon, pegawai, listrik, beli kertas, dan sebagainya. Nah yang akan datang saya tidak tahu. Ada kemungkinan karena merasa PKB ya PKB dan NU ya NU, mereka tidak mau tahu

meskipun massanya ya massa NU. Cuma mudah-mudahan tidak begitu.

Tapi ini ada cerita. Percayakah kita bahwa warga NU atau pemilih NU kemungkinan lebih banyak yang di luar PKB daripada yang di dalam PKB. Pengamatan saya tadi memang belum tuntas. Tetapi secara garis besar dimaksudkan untuk melakukan *checking* apakah kebijakan organisasi yang diambil Gus Dur kemarin sudah benar ataukah tidak. Kan tadinya berharap dukungan yang diperoleh sebagai kekuatan politik bisa maksimal dengan menjadikan PKB sebagai partai terbuka. Jadi NU-nya kumpul di situ, Cinanya kumpul di situ, Konghucunya kumpul di situ, Kristennya, Katoliknya, dan ya macam-macam. Tapi yang terjadi sebaliknya. Dukungan dari non-Islam atau non-NU malah seakan tidak terasa, sementara dukungan dari warga NU justru terpecah. Jadi orang NU sebenarnya bingung. Cuma saya melihat ada juga yang beralasan ideologis karena sifat partai yang terbuka tadi sehingga dianggap campur aduk.